

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- A.A. Navis, 1984. *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitifers.
- Amir M. S. 2001. *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Amir M.S. 2011. *Pewarisan Harato*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Amir Syarifuddin, 1960. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Arba, H.M. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Boedi Harsono, 2000. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1990 Ayat 3*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2019. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Dt. Maruhun Batuah. dkk, 1978. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Pusaka Asli Universitas Andalas Padang.
- Edison Piliang dan Hasrun, Dt. Maraja Sungut. 2014. *TAMBO MINANGKABAU: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- H. Julius Dt. Malako Nan Putihah. 1992. *Matrilineal dan Kekerabatan dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budaya Gebu Minang.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Ctk. 7. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo. 2018. *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

- Idrus Hakimi. 1978. *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: RemajaKarya.
- Iman Sudiyat. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Lexi J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Mohammad Jamin. 2014. *Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Fajar, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Nasroen, 1972. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Rajab. 1969. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang: Center Of Minangkabau Studies.
- Muhamad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Minangkabau*. Padang: PT Singgalang Press.
- Syaikhu. 2018. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: K-Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UII-Press).
- Soerjono Soekanto. 2020. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 189.
- Yaswiran, 2013. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zulherman Idris. 2000. *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*. Pekanbaru: Uir-Press.

Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah lain

- Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar. Sistem Kekeluargaan Matrilineal. *Artikel*. di akses pada tanggal 20 Juni 2025. Sumber: <https://blogminangkabau.wordpress.com/2009/01/04/sistim-kekeluargaan-matrilineal/>
- Adeb Devaga Prasna. 2018. "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Kordinat*. Volume 17 Nomor. 1.

- Ahmad Fachri, dkk. 2025. "Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama di Nagari Kasang". *Unes Journal of Swara Justisia*. Volume 9 Nomor 1.
- Diah Ramadhani, dkk. 2024. "Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)". *As-Siyadah*. Volume 3 Nomor. 1.
- Ernanto Arisandi. Asas Tunai dan Terang dalam Jual Beli Tanah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15061/Asas-Tunai-dan-Terang-dalam-Jual-Beli-Tanah.html>. Diakses pada 7 Agustus 2025.
- Ernawati dan Erwan Baharuddin. 2017. "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau". *lex jurnalica*. Volume. 14. Nomor. 3.
- Evuandi Ibrahim. 2020. "Peranan Penghulu terhadap Hak Ulayat di Minangkabau". *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 6 Nomor 1.
- Faridz Afdillah, dkk. 2024. "Harta Pusaka Tinggi oleh Perseorangan dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)". *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Volume 2 Nomor 1.
- Harniwati. 2019. "Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004". *Ensiklopedia Social Review*. Volume 1 Nomor 3.
- Hendrino, dkk, 2023. "Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*. Volume 7 Nomor 2.
- I Ketut Sudantra, dkk. 2017. "Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali". *Jurnal Kajian Bali*, Volume. 07 Nomor. 01.
- Iza Hanifurddin. 2012. "Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau". *Jurnal Juris*. Volume 11. Nomor 1.
- Maria S.W. Sumardjono. 1993. "Aspek Teoritis Peralihan Hak atas Tanah Menurut UUPA". *Majalah Mimbah Hukum*. Nomor 18/x/93. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mochamad Adib Zain. 2015. "Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2014 tentang Desa". *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 2 Nomor 2.

- Nafis, Yadzka. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014)". *Indonesian Notary*. Volume 2 Nomor 1.
- Oka Parwata. dkk. 2014. "Pola Penyelesaian Sengketa Adat di Bali". *Laporan Penelitian*.
- Puja Anjela, dkk. 2021. "Implementasi Asas Kesetaraan Gender dalam Pewarisan Tanah di Sumatera Barat". *Jurnal Law Development dan Justice Review*. Volume 4 Nomor 1.
- Ratih Agustin Wulandari, dkk. 2020. "Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya" *Jurnal Cendikia Hukum*. Volume 6 Nomor 1.
- Redha Rahayu. R. 2022. "Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang telah Disertifikatkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman". *Tesis*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Andalas.
- Richi Rahman, dkk. 2025. "Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum yang sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli melalui Notaris di Kota Padang". *UNES Law Review*. Volume 7 Nomor 3.
- Rinda Rifana. 2016. "Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan". *JOM Fakultas Hukum*. Volume. 3. Nomor. 2.
- Samharnen. 2014. "Jual Beli Tanah Kaum di Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang". *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas.
- Sari Betha Giofani. 2007. "Jual Beli Tanah Ulayat Uanggam Bauntuak yang telah di Sertifikat oleh Mamak Kepala Waris Tanpa Persetujuan Anggota Kaum di Kota Payakumbuh". *Tesis*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Syahrul Silmi, Syahrul. 2020. "Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai". *Notarius*. Volume 14 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang hukum Perdata tahun 1847, LN 1847 No. 23.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LN. 1960 No. 104. TLN No. 2043.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. LN. 1960 No. 174. TLN. 2117.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. LN. 2021 No. 28, TLN No. 6630.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. LD. 2008. No. 6.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. LD. 2018. No. 7.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. LD. 2023. No. 214.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2003 yakni tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Adat Nagari

Wawancara

Wawancara bersama Bapak Muhammad Nurzen selaku Wali Nagari Simarasok, pada tanggal 30 September 2025 pada Pukul 11.00 WIB.

Wawancara bersama Bapak Arzat Datuak Tambijo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari di Nagari Simarasok, pada tanggal 23 September 2025 pada Pukul 10.00 WIB.